

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

### *COMMUNITIES EMPOWERMENT IN THE INDONESIA'S NEW CAPITAL CITY*

Syarah Siti Supriyanti<sup>1</sup>, Nyimas Latifah Letty Aziz<sup>2</sup>, Yulianta<sup>3</sup>, A. Risdawati Alwi Paluseri<sup>4</sup>,  
Muhammad Fazri<sup>5</sup>, Choerunisa Noor Syahid<sup>6</sup>, Adelia Oktarina<sup>7</sup>, Januarta Dwi Kusmayanti<sup>8</sup>

Badan Riset dan Inovasi Nasional<sup>12345678</sup>

E-mail: <sup>1</sup>syar020@brin.go.id, <sup>2</sup>nyim002@brin.go.id, <sup>3</sup>yuli007@brin.go.id, <sup>4</sup>aris024@brin.go.id,  
<sup>5</sup>muha277@brin.go.id, <sup>6</sup>choe001@brin.go.id, <sup>7</sup>adel008@brin.go.id, <sup>8</sup>janu005@brin.go.id.

#### ABSTRACT

*The building of Indonesia's New Capital City (Ibu Kota Nusantara/IKN) focuses on involving the local people by acknowledging their cultural diversity and local wisdom. The government has scheduled 28 types of community training till 2022 to assist the development of IKN. However, there is still a lot of training that needs to be improved and tailored to meet current demands, as well as cross-sectoral synergy and collaboration. As a result, it is critical to focus on the government in order to plan training that is truly required for the development of IKN. East Kalimantan's demographics of productive age (60% of the population) can be leveraged to generate digital-based economic, innovation and creativity, a competitive workforce, increase entrepreneurial and raise investment. Women's participation must be encouraged in addition to youth empowerment. Furthermore, community empowerment techniques can be implemented in prospective industries in the vicinity of IKN, such as the logistics and tourist (MICE) sectors.*

**Keywords:** IKN, community empowerment, training, cultural diversity

#### ABSTRAK

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menitik beratkan pada proses pelibatan masyarakat sekitar dengan memperhatikan keanekaragaman budaya serta kearifan lokal masyarakatnya. Pemerintah telah mengagendakan sekitar 28 jenis pelatihan bagi masyarakat hingga tahun 2022 untuk mendukung proses pembangunan IKN. Namun, disana masih banyak pelatihan yang perlu dibenahi dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Sebagai hasilnya, perlu fokus dari pemerintah untuk mengagendakan pelatihan yang benar-benar dibutuhkan bagi pembangunan IKN. Demografi penduduk Kalimantan Timur usia produktif yang mencapai 60% dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kegiatan ekonomi berbasis digital, inovasi dan kreasi, tenaga kerja yang berdaya saing, meningkatkan semangat kewirausahaan dan meningkatkan nilai investasi. Selain pemberdayaan pemuda, keterlibatan perempuan perlu lebih didorong. Selanjutnya strategi pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan di sektor-sektor potensial pada wilayah sekitar IKN, yaitu pada sektor logistik dan sektor pariwisata dan MICE.

**Kata Kunci:** IKN, pemberdayaan masyarakat, pelatihan, keanekaragaman budaya.

#### PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial atau masyarakat sekaligus mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *people centred*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable* (Chamber, 1995). Pemberdayaan masyarakat sering dikaitkan

dengan pembangunan masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial secara berkelanjutan (Noor, 2011). Undang-undang (UU) Nomor 25

Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik.

Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme serta membangun jejaring kerja bagi warga lokal agar mampu berkontribusi optimal ketika tahapan pembangunan IKN dimulai. Proses pemberdayaan masyarakat dalam konteks IKN ini dapat dilakukan dengan mengadopsi skema pembangunan IKN yang berjenjang dari jangka pendek, menengah, dan panjang (kemendagri.go.id, 2022). Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga harus memperhatikan keanekaragaman budaya serta kearifan lokal masyarakat sekitar. Hal ini menjadi perlu mengingat masyarakat IKN kedepannya akan menjadi masyarakat yang plural. Namun, pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar IKN yang telah dilakukan hingga saat ini, ternyata masih belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan IKN, baik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Padahal untuk bisa menangkap segala peluang kerja dan pasar kerja yang ada di IKN dibutuhkan pemberdayaan masyarakat yang tepat sesuai dengan keanekaragaman budaya serta kearifan lokal masyarakat sekitar.

## PEMBAHASAN

Proses pemberdayaan masyarakat perlu didorong untuk dimaksimalkan melalui pemanfaatan teknologi digital dan tetap memperhatikan kearifan dan budaya lokal masyarakat. (kemenkopmk.go.id, 2022). Untuk itu beberapa hal yang perlu dilakukan; yakni (1) melakukan sinergi pembangunan daerah sekitar kawasan IKN dengan arah pembangunan nasional di Pulau

Kalimantan, secara khusus terkait pembangunan SDM dan kebudayaan; (2) melakukan kolaborasi lintas sektor untuk peningkatan kapasitas SDM di sekitar kawasan IKN diarahkan mendukung aspek lingkungan, infrastruktur dan mobilitas warga, tata kelola pemerintahan desa, ekonomi desa, kualitas hidup warga desa, serta keterampilan dan inovasi desa; (3) melakukan pendampingan dan pelatihan SDM Desa berbasis TIK sehingga mampu menerapkan layanan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis teknologi digital; (4) melakukan pembangunan, peningkatan, dan perluasan jaringan dan akses internet, sehingga masyarakat di sekitar kawasan IKN dapat meningkatkan kemampuan melalui berbagai pelatihan yang tersebar luas di internet; (5) melakukan pembangunan ekosistem digital di desa untuk mendorong tumbuhnya ekonomi digital dan percepatan kesejahteraan masyarakat; (6) mendorong desa menjadi subjek pelaku ekonomi melalui penyediaan SDM dan SDA di desa, termasuk penciptaan ekosistem bisnis dan kewirausahaan masyarakat desa; dan (8) meningkatkan dan mengembangkan kapasitas SDM agar sejalan dengan kearifan lokal, selaras dengan tradisi dan budaya setempat guna mendukung suksesnya pembangunan IKN.

Sejalan dengan hal tersebut, saat ini pemerintah telah mengagendakan 28 jenis pelatihan untuk warga di wilayah IKN (kompas.com, 2022). Program-program yang telah dan akan dilakukan agar SDM yang disiapkan betul-betul memiliki kualitas dan kapasitas sesuai kebutuhan dalam rangka pembangunan IKN. Sebagai contoh, program pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di kawasan IKN oleh Kementerian PUPR, tahap I yang diikuti sekitar 1.535 peserta sebagai upaya meningkatkan kompetensi SDM di bidang konstruksi. Estimasi kebutuhan TKK dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara periode 2022-2024 dibutuhkan kurang lebih 260.000 orang tenaga kerja konstruksi dengan rincian tahun 2022 sebanyak 30.000 orang, tahun 2023 sebanyak 123.000 orang, dan tahun 2024 sebanyak 107.000 orang (Salsabila, 2022). Selain itu, pembangunan IKN juga dilakukan melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan melibatkan lima balai latihan kerja

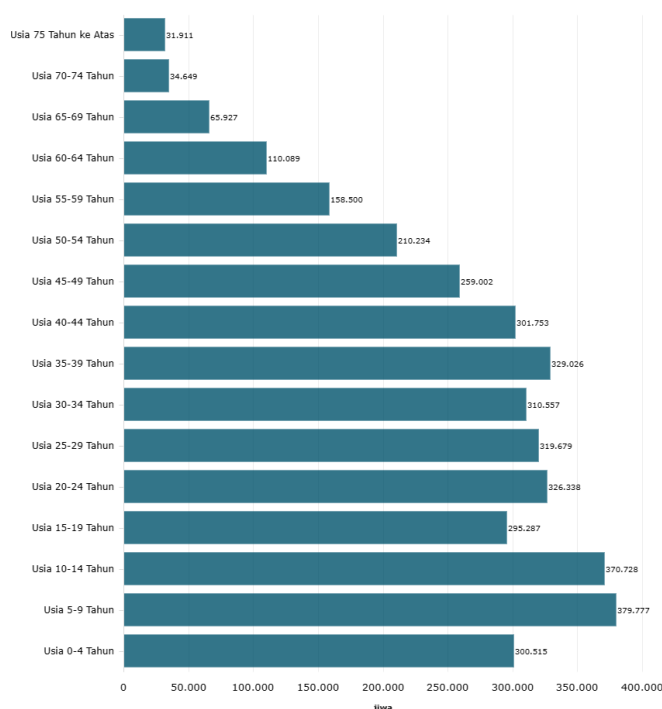
(BLK) di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Ibu Kota Nusantara (beritasatu.com, 2022). Pelibatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dalam pembangunan gedung perkantoran dan infrastruktur pendukung IKN. BLK tersebut akan memberikan pelatihan kerja tidak hanya bagi warga lokal maupun warga di sekitar kawasan IKN, tetapi juga masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Kaltim. Saat ini, BLK tersebut telah meluluskan sedikitnya 280 tenaga kerja dengan kemampuan di berbagai bidang, seperti konstruksi dan bangunan, bidang pengoperasian alat berat, bidang kuliner, hingga bidang teknik kelistrikan.

Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dengan peningkatan kompetensi pelatihan di sektor Agroindustri dan Teknologi Informatika oleh BLK yang bekerja sama dengan berbagai pihak antara lain Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda, Kecamatan Sepaku, dan Dinas Perindustrian (kaltimprov.go.id, 2022). Dukungan dari dinas terkait juga dilakukan oleh Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi, Pembinaan Masyarakat Desa untuk memberikan pelatihan UMKM dan oleh Dinas Pariwisata untuk mengelola pariwisata yang berstandar IKN, dan peningkatan kemampuan individu oleh BLK. Bahkan, ke depannya juga akan dilakukan pengembangan potensi lokal melalui konsep “One District One Product” (Satu Kecamatan Satu Produk) atau “One Village One Product” (Satu Desa Satu Produk), sebagai bagian dari konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Realisasi pada agenda-agenda pelatihan tersebut, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur telah diadakan paket pelatihan yang sudah melibatkan 1.800 masyarakat di Kecamatan Sepaku. Paket pelatihan ini meliputi pelatihan barista, menjahit, sablon, tata boga, operator alat berat, dan sertifikasi tukang. Namun, paket pelatihan ini masih berupa paket pelatihan yang memang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat, belum benar-

benar menyentuh pelatihan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN atau minimal yang sesuai dengan agenda-agenda pelatihan tersebut.

Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menunjukkan sebanyak 2,62 juta jiwa (68,89%) penduduk Kalimantan Timur termasuk dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun) (katadata.co.id, 2021). Banyaknya persentase jumlah usia produktif turut menambah jumlah tenaga kerja di Kalimantan Timur. Jika dikelola dengan baik, tenaga kerja usia produktif dapat meningkatkan tingkat produktivitas di Kalimantan Timur.



Gambar 1. Jumlah Penduduk Kalimantan Timur Menurut Kelompok Umur Per Juni Tahun 2021

Sumber: katadata.co.id, 2022

Jumlah penduduk usia produktif yang mencapai lebih dari 60 persen ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kegiatan ekonomi berbasis digital, inovasi baru, profesi baru, dan meningkatkan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam kategori penduduk usia produktif termasuk didalamnya kategori pemuda, yaitu kelompok umur 15-24 tahun (definisi menurut WHO) yang jumlahnya mencapai lebih dari 600 ribu penduduk. Dengan melihat potensi ini, pemerintah dapat memberikan

dukungan melalui program pemberdayaan pemuda kreatif, inovatif, mandiri, berdaya saing, dan memiliki semangat kewirausahaan (kemenpora.go.id, 2022). Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, diantaranya:

1. Meningkatkan pemerataan taraf pendidikan masyarakat dengan mempermudah akses pendidikan dan memperbaiki mutu pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja;
3. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan daya saing angkatan kerja melalui perluasan kesempatan kerja dengan meningkatkan pengembangan kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja, dan meningkatkan keterampilan angkatan kerja.

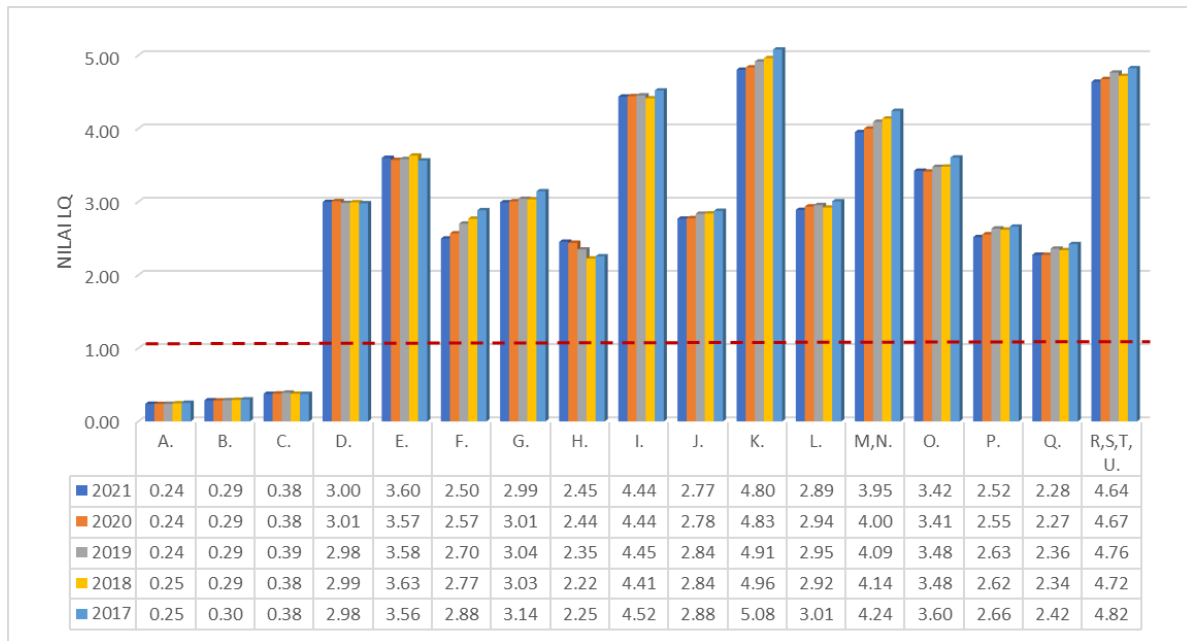
Selain pemberdayaan pemuda, keterlibatan perempuan juga perlu diperhatikan dan didukung untuk terus meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan di Indonesia terutama dalam mendukung pembangunan IKN. Merujuk pada Profil Perempuan Indonesia Tahun 2021 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022), persentase perempuan kepala rumah tangga terendah di perkotaan terdapat di provinsi Kalimantan Timur sebesar 10,16 persen. Selain itu, Kalimantan Timur termasuk provinsi dengan tingkat persentase kepala rumah tangga perempuan yang menerima kredit tinggi yakni di perkotaan (13,41%) dan pedesaan (20,08%).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Rapat Koordinasi Perempuan Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan tema Peningkatan Peran Perempuan Pada Era Digital Ekonomi untuk Menyongsong IKN berkomitmen untuk dapat memenuhi dan menjamin keterlibatan perempuan dalam mengisi pembangunan IKN di semua sektor (kaltimprov.go.id, 2022). Perempuan dapat terlibat di berbagai bidang pembangunan baik politik, sosial, pendidikan, bahkan bidang ekonomi melalui inovasi produk UMKM (ikn.

go.id, 2021). Perempuan perlu menangkap peluang ini, melalui pemanfaatan teknologi digital sehingga diharapkan perempuan tidak gagap teknologi. Tentunya hal ini memerlukan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya melalui peningkatan kapasitas bagi kaum perempuan. Dengan demikian, strategi pemberdayaan masyarakat di sektor-sektor potensial pada wilayah sekitar IKN dapat dilakukan pada sektor logistik serta pada sektor pariwisata dan MICE.

### **A. Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Logistik.**

Dalam rangka pembangunan IKN menjadi *superhub* ekonomi nasional maka diperlukan dukungan dari sektor logistik dan transportasi. Pengembangan sektor logistik ini tidak hanya terbatas pada kawasan IKN namun juga pada wilayah mitra seperti Samarinda. Dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 lebih menekankan pada pembangunan seluruh bidang sektor. Pada tahap ini, diharapkan tidak hanya sektor-sektor unggulan daerah yang lebih menggeliat tetapi pada seluruh sektor. Pembangunan dan pengelolaan 3 (tiga) sektor pembangunan yaitu pembangunan dari sektor industri, perdagangan dan jasa, diarahkan pada penguatan daya saing Kota Samarinda dalam bidang tersebut. Hasil analisis *Location Quotient* (LQ), menunjukkan sektor jasa logistik yang diperoleh dari sektor Transportasi dan Pergudangan, serta Informasi dan Komunikasi dalam hal digitalisasi logistik menjadi salah satu sektor ekonomi yang dapat diunggulkan di Samarinda.



A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	M,N. Jasa Perusahaan
B. Pertambangan dan Penggalian	H. Transportasi dan Pergudangan	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
C. Industri Pengolahan	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	P. Jasa Pendidikan
D. Pengadaan Listrik dan Gas	J. Informasi dan Komunikasi	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	K. Jasa Keuangan	R,S,T,U. Jasa Lainnya
F. Konstruksi	L. Real Estate	

**Gambar 2.** Analisis LQ Kota Samarinda Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2022 (data diolah)

Dalam pengembangan sektor logistik terdapat beberapa jenis jasa, yakni jasa logistik e-commerce, jasa kurir, jasa pergudangan bahan pokok dan barang retail, jasa layanan logistik yang berkaitan dengan transaksi Business to Customer (BtoC) dan Customer to Customer (CtoC) yang perlu dikembangkan. Selain itu dalam kondisi ekonomi ketika sudah pulih dan normal diperlukan pelayanan logistik untuk jenis kegiatan jasa angkutan barang moda udara, laut, truk peti kemas, truk ekspor impor, bahan baku industri manufaktur, bongkar muat, jasa kegiatan *customs* dan *port clearance*, depo peti kemas, jasa pergudangan bahan baku impor dan berikat, serta kegiatan logistik yang transaksinya bisnis ke bisnis (BtoB) (Azka, 2020).

Saat ini sektor logistik juga berkembang dengan memanfaatkan digitalisasi sehingga pelayanan lebih cepat, efektif dan efisien. Peluang

pengembangan sektor logistik Kota Samarinda yang terutama, yaitu kebutuhan jasa logistik dan akomodasi di IKN dan sekitarnya, dan kebutuhan tenaga kerja sektor logistik di IKN dan daerah sekitarnya yang akan membuka lapangan kerja baru. Adapun tantangan pengembangan sektor logistik Kota Samarinda, diantaranya: (1) penyediaan SDM yang melek digital khususnya terkait dengan sektor logistik, (2) menjawab kebutuhan akan kecepatan proses pengiriman barang dan jasa dari satu tempat lainnya dalam waktu singkat dan berbiaya murah, dan (3) potensi adanya SDM berkualitas dari luar Kalimantan Timur (Pulau Jawa) yang akan turut berkompetisi dalam aktivitas logistik. Strategi penguatan untuk menjawab peluang dan tantangan dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, seperti:

- a. Pengembangan SDM logistik melalui pendidikan formal dan jalur profesi;

- b. Memanfaatkan potensi jumlah penduduk usia muda dengan meningkatkan kompetensi pekerja di sektor logistik, mulai dari pelayanan hingga penguasaan teknologi digital;
- c. Mendorong SDM logistik agar mampu menggunakan teknologi *artificial intelligence* (AI) dan *internet of things* (IoT) di bidang pergudangan, pelayaran, dan transportasi;
- d. Perlunya mengembangkan skema pelatihan dan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bidang logistik.

## B. Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Pariwisata dan MICE.

Industri MICE menjadi salah satu sektor unggulan pariwisata di Indonesia karena dinilai memiliki potensi besar dalam perkembangan pariwisata Indonesia. Tak hanya itu, industri MICE dikategorikan ke dalam industri padat karya yang dapat menyerap cukup banyak tenaga kerja di dalamnya. Dengan adanya industri MICE di dalam satu wilayah, maka dapat dipastikan sektor pariwisatanya berjalan dengan baik. Pasalnya sektor industri MICE dapat menarik jumlah wisatawan yang datang dalam jumlah besar, dengan masa tinggal lebih lama, dan tentunya perputaran uang yang terjadi dalam satu wilayah juga lebih banyak (Indrajaya, 2015). Salah satu rencana pengembangan IKN sebagai *superhub* ekonomi diwujudkan dalam kluster ekowisata dengan mengembangkan ekowisata kelas dunia berbasis aset ekowisata dan pariwisata kebugaran dengan identitas global khas Kalimantan Timur. Pengembangan ekowisata juga akan ditunjang oleh pariwisata kota, *meetings, incentives, conferencing, exhibitions* (MICE), serta wisata kesehatan dan kebugaran (UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN).

Segmentasi pasar industri MICE umumnya berasal dari pemerintahan, industri, dan asosiasi tertentu, namun jangkauannya bisa menjadi luas mulai dari tingkat lokal, nasional, regional hingga internasional. Kota tujuan kegiatan MICE di Indonesia merupakan destinasi seksi bagi pariwisata Indonesia. Oleh sebab itu, Kemenparekraf telah menetapkan 16 kota yang

layak jual untuk pasar utama aktivitas MICE, salah satu diantaranya adalah Kota Balikpapan yang sangat erat dengan IKN. Berdasarkan peta IKN berikut ini (Gambar 1), terlihat bahwa kabupaten/kota mitra IKN seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara sangat berpotensi untuk menjadi wilayah tujuan MICE. Untuk itu tentunya pemerintah kabupaten/kota daerah mitra harus mulai bersiap untuk pengembangan industri pariwisata berbasis MICE.



Gambar 3. Daerah Mitra IKN  
Sumber: Kaltimpost.jawapos.com

Berdasarkan hasil kajian literatur dan berbagai sumber, terdapat enam sektor usaha yang terkait dari dikembangkannya industri MICE ini, antara lain:

1. **Penyedia akomodasi.** Setiap penyelenggaraan MICE sudah dapat dipastikan memerlukan akomodasi berupa hotel dengan spesifikasi dan fasilitas tertentu untuk mendukung kegiatan MICE, seperti ruang rapat dan *conference/exhibition room*. Pada kegiatan tersebut, penyelenggara biasanya juga akan membutuhkan kamar untuk tempat istirahat para peserta kegiatan.

**Tabel 1.** Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur Hotel Berbintang di Kalimantan Timur Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
Paser	2	52	348
Kutai Barat	-	-	-
Kutai Kartanegara	2	122	154
Kutai Timur	2	52	165
Berau	-	-	-
Penajam Paser Utara	-	-	-
Mahakam Ulu	-	-	-
Balikpapan	45	3.176	6.681
Samarinda	16	1.452	2.535
Bontang	3	215	345
<b>Kalimantan Timur</b>	<b>70</b>	<b>5.069</b>	<b>10.228</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur 2022 (data diolah).

Berdasarkan data pada Tabel 3 dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan, maka Kota Balikpapan adalah wilayah mitra IKN yang lebih siap dalam pengembangan industri MICE dibanding dengan wilayah mitra lainnya.

2. **Penyedia food & beverage (F&B).** Sama dengan penyedia akomodasi, industri F&B memegang peranan penting dalam keberlangsungan penyelenggaraan kegiatan. Dalam kegiatan ini potensi untuk memperkenalkan makanan dan minuman khas Indonesia dapat menjadi promosi. Selain itu pula, ketersediaan restoran dengan standar khusus yang dapat menampung cukup banyak peserta dapat menjadi sumber kekuatan pengembangan ekonomi baru di wilayah IKN dan daerah mitranya.
3. **Penyedia entertainment.** Sebagai pendukung kegiatan penyelenggaraan MICE, kebutuhan sarana rekreasi dan hiburan bagi para peserta kegiatan menjadi pilihan yang harus disiapkan. Alternatif tujuan wisata apa saja yang dapat menjadi pilihan bagi para peserta, yang dapat menjadi momen terbaik untuk dibagikan saat mereka kembali ke tempat asalnya. Hal ini menjadi penentu tentang bagaimana tujuan wisata dikelola dengan baik.
4. **Penyedia transportasi.** Jasa penyedia transportasi menjadi bagian penting yang

mendukung keberlangsungan kegiatan. Transportasi yang membawa peserta kegiatan dipastikan dapat memberikan pelayanan terbaik. Tak hanya peserta dalam jumlah besar, jasa transportasi kendaraan kecil pun memiliki potensi untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan MICE.

5. **Penyedia sentra belanja.** Salah satu efek domino yang dapat dirasakan adalah sentra-sentra belanja yang menyediakan cinderamata dan oleh-oleh khas dari kunjungan peserta. Potensi pengembangan unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sangat besar dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan. Selain itu, sentra-sentra perbelanjaan dapat menentukan jumlah uang yang dikeluarkan oleh para peserta kegiatan. Dengan pengelolaan sentra belanja dan pengembangan UMKM yang terarah maka dapat dipastikan potensi besar yang dapat diperoleh lewat kegiatan MICE ini. Adapun sentra perbelanjaan terkenal di Kalimantan Timur, antara lain: BIG Mall, Mall Pentacity, Transmart Carrefour, Pasar Citra Niaga dan Samarinda Central Plaza.
6. **Penyedia jasa tur dan travel.** Peran dari penyedia jasa tur dan travel sangat penting dalam proses reservasi transportasi dan akomodasi bagi mereka yang hendak menghadiri kegiatan, hingga tawaran paket wisata yang dapat diberikan kepada para pengunjung.

Meskipun memiliki cukup banyak potensi, pengembangan pariwisata melalui sektor MICE perlu diperhatikan, terutama dalam tata kelola pariwisata di IKN dan wilayah mitra. Oleh karena itu, apabila tidak dikelola dengan baik maka alih-alih mendapatkan keuntungan dan mencapai visi, tetapi pengembangan pariwisata di sektor MICE justru dapat menimbulkan permasalahan baru yang akan berdampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang patut menjadi perhatian pemerintah, antara lain:

1. **Keterlibatan masyarakat lokal.** Salah satu hal yang akan dibangun oleh pemerintah dalam strategi pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dengan melakukan pembangunan yang inklusif. Bisnis MICE dalam pariwisata sudah tentu menyerap banyak tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal. Hal itu tentu menarik minat para usia produktif untuk mengambil bagian dalam industri ini. Tentu saja ketika IKN terbuka, dapat dipastikan Kalimantan Timur menjadi salah satu tujuan urbanisasi. Oleh karena itu, pemerataan akses dan keterlibatan masyarakat lokal pada industri pariwisata perlu menjadi perhatian.
2. **Jejak karbon dan kelestarian lingkungan.** Sebagaimana yang menjadi visi Kemenparekraf, pengembangan industri pariwisata haruslah berbasis ekowisata. Ekowisata yang ditawarkan haruslah mengedepankan komitmen dari pemerintah untuk tidak merusak kelestarian lingkungan. Namun di saat yang bersamaan, pasca dibukanya IKN yang juga berperan sebagai MICE industri tentu akan meninggalkan jejak karbon yang tinggi. Dengan demikian, perlu menjadi perhatian sekaligus tugas berat baik oleh pemerintah maupun masyarakat terkait bagaimana perhitungan antara jejak karbon yang ditinggalkan melalui paket ekowisata ini sehingga dapat seimbang atau bahkan lebih banyak untuk pelestarian lingkungan.
3. **Monopoli bisnis.** Seperti yang diketahui bahwa industri MICE di Indonesia saat ini sudah ada beberapa pemain besar. Meskipun demikian, pemerintah perlu membuat

aturan bagaimana industri MICE ini dapat memberikan peluang bagi lokal untuk dapat berkembang. Selain itu, perlu adanya suatu kajian lebih lanjut terkait dengan kebijakan tata kelola MICE di wilayah IKN dan kabupaten/kota mitra.

Pengembangan sektor pariwisata dan MICE merupakan pintu masuk untuk memperkenalkan pariwisata sebagai destinasi wisata khusus (*special interest tourism*) (Nugroho dkk, 2018). Selain mempersiapkan infrastruktur fisik baik utama maupun penunjang pariwisata, perlu juga disiapkan SDM yang memiliki kapabilitas di sektor tersebut melalui pemberdayaan masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pariwisata, seperti pendidikan SMK, advokasi, maupun S1 di bidang pariwisata;
- b. Memberikan pelatihan dan meningkatkan jumlah SDM yang memiliki sertifikasi sesuai dengan standar MICE internasional;
- c. Mendorong terbentuknya kelompok sadar wisata (pokdarwis) untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
- d. Mendorong SDM pariwisata untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dan mampu menggunakan teknologi IoT.

## PENUTUP

IKN sebagai Ibu Kota Negara menjadi pusat pemerintahan baru yang memiliki keragaman budaya. Ke depannya, IKN perlu dikembangkan agar lebih baik melalui peningkatan kapasitas SDM. Untuk itu, diperlukan suatu strategi pemberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih berdaya dengan tetap mengedepankan potensi dan kearifan lokal. Pengembangan sektor logistik, pariwisata, dan MICE memerlukan dukungan pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya itu, industri pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan juga menjadi konsen dalam pembangunan IKN. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan terus menerus agar masyarakat memiliki kapasitas dan



kapabilitas dalam penggunaan teknologi tepat guna, penerapan teknologi pengolahan pasca panen, *urban farming*, serta pengenalan ekonomi sirkular bagi masyarakat (Supriyanti, dkk, 2022). Dengan demikian, strategi pemberdayaan masyarakat sekitar di wilayah IKN yang tepat sasaran, khususnya pada program dan kebutuhan pembangunan IKN akan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka.

## PUSTAKA ACUAN

- Azka, R.M. (2020). *Ini Sektor Logistik yang Tetap Berjaya saat Pandemi*. Diakses di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200826/98/1283536/ini-sektor-logistik-yang-tetap-berjaya-saat-pandemi>.
- Beritasatu.com, (05 Agustus 2022). *Kemenaker Libatkan 5 BLK di Kaltim untuk Pembangunan IKN*. Diakses di <https://www.beritasatu.com/news/960393/kemenaker-libatkan-5-blk-di-kaltim-untuk-pembangunan-ikn>.
- Chambers, R. (1995). *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Environment and Urbanization, Vol. 7 (1): 173-204*.
- Ikn.go.id, (08 Desember 2021). *Perempuan Kaltim Diharap Berkontribusi Pada Pemindahan Ibu Kota Negara*. Diakses di <https://ikn.go.id/en/perempuan-kaltim-diharap-berkontribusi-pada-pemindahan-ibu-kota-negara>
- Indrajaya, T. (2015). *Potensi Industri MICE (Meeting, Incentive, Conference And Exhibition) di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten*. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 3(2), pp.80-87.
- Kaltimprov.go.id, (03 Juli 2022). *Senin Besok, Warga Sekitar Ibu Kota Nusantara Ikuti Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat*. Diakses di <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pembangunan/senin-besok-warga-sekitar-ibu-kota-nusantara-ikuti-pelatihan-pemberdayaan-masyarakat>.
- Kaltimprov.go.id, (08 Desember 2022). *Perempuan Punya Peluang Besar Mengisi Pembangunan IKN*. Diakses di <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2022/12/08/perempuan-punya-peluang-besar-mengisi-pembangunan-ikn/>
- Katadata.co.id, (22 Desember 2021). *Sebanyak 6889 Penduduk Kalimantan Timur Berusia Produktif Pada Juni 2021*. Diakses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/22/sebanyak-6889-penduduk-kalimantan-timur-berusia-produktif-pada-juni-2021>.
- Kemendagri.go.id, (02 Juni 2022). *Pembangunan Infrastruktur di Kawasan IKN Harus Diimbangi dengan Pemberdayaan Masyarakat*. Diakses di <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/pembangunan-infrastruktur-di-kawasan-ikn-harus-diimbangi-dengan-pemberdayaan-masyarakat>.
- Kemenkopmk.go.id, (17 Juni 2022). *Pentingnya Pelibatan Masyarakat Lokal dalam Proses Pembangunan IKN Nusantara*. Diakses di <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-pelibatan-masyarakat-lokal-dalam-proses-pembangunan-ikn-nusantara>.
- Kemenpora.go.id, (04 Agustus 2021). *Menpora Amali Ingin Mahasiswa Jadi Pemuda Kreatif, Inovatif, Mandiri dan Berdaya Saing*. Diakses di <https://kemenpora.go.id/detail/796/menpora-amali-ingin-mahasiswa-jadi-pemuda-kreatif-inovatif-mandiri-dan-berdaya-saing>
- Kompas.com, (04 Juli 2022). *Pemerintah Siapkan 28 Jenis Pelatihan untuk Warga Lokal di IKN*. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/04/05445351/pemerintah-siapkan-28-jenis-pelatihan-untuk-warga-lokal-di-ikn>.
- Noor, M. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. 2(2)*.
- Nugroho, S.P., dkk. 2018. *Strategi Pengembangan MICE sebagai Upaya Peningkatan Sektor Pariwisata Kota Surakarta*. *Prosiding The National Conference on Management and Business (NCMAB)*, 176-189.
- Salsabila, A. (2022). *Pembangunan IKN Prioritaskan Pemberdayaan Masyarakat Lokal*. Diakses di <https://www.neraca.co.id/article/171908/pembangunan-ikn-prioritaskan-pemberdayaan-masyarakat-lokal>.
- Supriyanti, S.S., AP, A.R., Syahid, C.N. (2022). *Pemantauan Ekonomi dan Pembangunan Terkini Volume 1 No. 3 Oktober 2022: Potensi Pengembangan Industri Pertanian Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara*.
- Who.int. *Adolescent health in the South-East Asia Region*. Diakses di <https://www.who.int/southeastasia/health-topics/adolescent-health>.

